SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
POKJA PENGADAAN BARANG & JASA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10440 Telp 021-3905876, 3905877, 3906178
Faksimile +62-021-31903755, Website : www.komisiyudisial.go.id,
EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

LEMBAR DATA KUALIFIKASI
(Addendum)

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan
Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi

Nomor : 01.Add.SELEKSI/LDK/UKPBJ.KY/08/2026

A. Umum

1.Lingkup Pekerjaan

1.1 Kode RUP: **67609219**

1.2 Nama Paket Pengadaan: **Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi**

1.3 Uraian Singkat Paket Pengadaan:
Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2026, yaitu sebuah kegiatan pengukuran komprehensif berbasis data yang memadukan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama dan kualitatif, dimana secara umum dimaknai sebagai alat ukur untuk memetakan tingkat integritas para hakim melalui indikator-indikator yang relevan dan mengevaluasi sejauh mana perilaku hakim konsisten dengan nilai-nilai kemandirian, ketidakberpihakan, kepantasan, kesetaraan, kompetensi dan ketekunan, serta integritas. Pelaksanaan kegiatan ini mengambil tema evaluasi outcomes dan dampak program Komisi Yudisial terhadap hakim dan masyarakat melalui survei di 34 Provinsi, melalui metode pemilihan Seleksi Jasa Konsultan dengan metode evaluasi kualifikasi pada PraKualifikasi dua sampul, juga metode evaluasi penawaran berupa Kualitas dan Biaya, dengan Jenis Kontrak Lumpsum, dan bentuk kontrak Surat Perjanjian. Kegiatan ini merupakan domain ke-PPK-an 6 pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, sementara proses Seleksi dilakukan oleh Pokja Komisi Yudisial selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari kalender di Kantor Komisi Yudisial.

1.4 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: **Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

1.5 Nama UKPBJ: **UKPBJ KYRI**

1.6 Nama Pokja Pemilihan: **POKJA Pemilihan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Provinsi**

1.7 Alamat Pokja Pemilihan: **Jl. Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat**

1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: **www.komisiyudisial.go.id**

1.9 Website UKPBJ: **www.komisiyudisial.go.id**

1.10 Website SPSE: **https://spse.inaproc.id/kemenkeu**

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: **DIPA/DPA 100.01.1.439479/2026** Tahun Anggaran **2026**.

C. Penyiapan Data Kualifikasi

13.2 Bentuk Data Kualifikasi

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
   a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
   b) Bidang Usaha: **KBLI 63111, KBLI 70209, KBLI 72201, dan KBLI 73202**
2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
   c) Bukti bahwa yang diberi kuasa merupakan pgawai tetap (apabila dikuasakan)
   d) Kartu Tanda Penduduk
5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
   a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
   c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
   a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
   d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
   e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:
a) Konsultan memiliki pengalaman Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Konsultan memiliki pengalaman Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai RAB;
c) Memiliki jaringan atau perwakilan di seluruh Indonesia, tiap propinsi dibuktikan dengan Surat Penunjukan Personil/Rekanan di 34 Provinsi; dan
d) Anggota KSO yang memiliki jaringan/perwakilan di 34 Provinsi atau Surat dukungan dari Lembaga di 34 Provinsi.
e) Memiliki tim pakar konsultan yang sesuai dan memahami wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI
f) Memiliki pemahaman mendalam terkait Komisi Yudisial

2) Memiliki sumber daya manusia:
a) Manajerial;
b) Tenaga Ahli; dan
c) Tenaga kerja.

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI

Berikut merupakan lembar kriteria evaluasi kualifikasi yang digunakan oleh Pokja Pemilihan

1. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	Ada/ Tidak Ada	M/TM
1.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:		
	- Izin usaha		
	- NIB/TDP		
2.	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak:		
	- Memiliki NPWP		
3.	Alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan		
4.	Akta Pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya		
5.	Surat kuasa (apabila dikuasakan)		
6.	KTP (dari Kuasa Badan Usaha)		
7.	Surat Perjanjian Kemitraan (apabila berbentuk Kemitraan)		

2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis

a. Persyaratan pengalaman minimal

Persyaratan Pengalaman Minimal	Ada/ Tidak Ada	M/TM
1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak		
2) Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak		
3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran		

Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dikecualikan dari angka 1) sampai dengan angka 2) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal apabila memenuhi persyaratan di atas. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi pengalaman minimal dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi teknis.

b. Persyaratan kualifikasi teknis

No	***Uraian Evaluasi***	***Nilai Maksimum***	***Ambang Batas***	***Kriteria Penilaian***
1	*Unsur Pengalaman Perusahaan*	***60***	**-**	
	a. *Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak*	*15*	**-**	*Jumlah Pengalaman:* 1) *≥ 4 kali diberikan nilai 15* 2) *3 kali diberikan nilai 10* 3) *2 kali diberikan nilai 5* 4) *1 kali diberikan nilai 3*
	b. *Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak*	*15*	**-**	*Jumlah Pengalaman:* 1) *≥ 4 kali diberikan nilai 15* 2) *3 kali diberikan nilai 10* 3) *2 kali diberikan nilai 5* 4) *1 kali diberikan nilai 3*
	4) *Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran*	*30*	**-**	Jumlah Pengalaman mengelola nilai kontrak paling kurang 50% HPS dari pekerjaan sejenis: 1) *≥ 4 kali diberikan nilai 30* 2) *3 kali diberikan nilai 20* 3) *2 kali diberikan nilai 10* 4) *1 kali diberikan nilai 5*
2.	*Sumber Daya Manusia*	***30***	***20***	
	a. *Jumlah Tenaga Ahli Tetap Badan Usaha*	*20*	*15*	*Kriteria penilaian:* 1) *≥ 6 Tenaga Ahli Tetap diberikan nilai 20*

				2) *4 – 5 Tenaga Ahli Tetap diberikan nilai 15* 3) *2 – 3 Tenaga Ahli Tetap diberikan nilai 10* 4) *1 Tenaga Ahli Tetap diberikan nilai 5*
	b. *Tenaga Kerja (apabila diperlukan)*	*10*	*5*	*Kriteria penilaian:* 1) *≥ 6 Tenaga Kerja diberikan nilai 10* 2) *4 – 5 Tenaga Kerja diberikan nilai 8* 3) *2 – 3 Tenaga Kerja diberikan nilai 6* 4) *1 Tenaga Kerja diberikan nilai 4*
3.	*Kemampuan menyediakan peralatan (apabila diperlukan)*	***10***	***5***	
	a. Kepemilikan fasilitas peralatan _____	*10*	*5*	*Kriteria penilaian:* 1) *Milik sendiri diberikan nilai 10* 2) *Sewa diberikan nilai 5* 3) *Tidak memiliki/menguasai diberikan nilai 0*
Jumlah Nilai		***100***	***20***	*Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur di atas ambang batas.*